KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : PAN Isyaratkan Keluar Pansus Angket
Tanggal : Jumat, 28 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

PAN Isyaratkan Keluar Pansus Angket

● FAUZIAH MURSID
DADANG KURNIA

Hasil evaluasi sementara PAN menunjukkan pansus melemahkan KPK.

JAKARTA—Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengisyaratkan akan menarik diri atau keluar dari keanggotaan Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PAN masih menimbang soal kinerja pansus angket apakah untuk menguatkan atau melemahkan KPK.

Sekretaris fraksi PAN di DPR Yandri Susanto mengatakan, PAN akan terlebih dahulu mengevaluasi progres keseluruhan Pansus Hak Angket KPK selama ini. Kalau dalam hasil evaluasi yang dilakukan PAN menunjukkan kecenderungan pansus melemahkan KPK, mereka akan mengirim surat menarik anggotanya dari pansus. Yandri mengklaim harapan PAN selama ini adalah penguatan KPK dari pansus.

"Misal, kita dapatkan kecenderungan kerja pansus sudah tidak sesuai harapan PAN yang justru melemahkan KPK maka kemungkinan PAN akan menarik diri dari anggota Pansus KPK. Kecenderungan kuat menarik diri itu ada," ujar Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/7).

Menurutnya, instruksi evaluasi merupakan mandat dari hasil rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN pada Rabu (26/7) kemarin. Dalam rapat DPP PAN, tiga perwakilan fraksi PAN di Pansus Hak Angket KPK diminta melaporkan hasil kerja pansus kepada fraksi. Tiga anggota fraksi PAN di pansus angket adalah Mulfachri Harahap, Daeng Muhammad, dan Muslim Ayub.

Hasil laporan dari ketiga perwakilan PAN di Pansus Hak Angket akan menjadi kunci keputusan PAN nantinya. Yandir menegaskan, PAN akan mengambil sikap kalau laporan perwakilan fraksi PAN tidak sesuai dengan harapan PAN selama ini. PAN menegaskan keikutsertaan mereka di pansus angket untuk menguatkan KPK.

Menurut Yandri, sejak awal PAN tidak ingin bergabung dengan Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk DPR. Namun, ternyata ketidakikutsertaan PAN tidak memengaruhi pembentukan pansus. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tetap mengesahkan pembentukan pansus angket di rapat paripurna. Akhirnya, PAN bersedia mengirim perwakilannya menjadi anggota pansus angket.

"Di awal harapan pansus tidak terbentuk tapi ternyata kan pansus berjalan, kami khawatir terjadi pelemahan terhadap KPK makanya kita bergabung," ujar Yandri.

Yandri menyebut dalam laporan awal dari tiga perwakilan fraksi di pansus, mengarah pada upaya melemahkan KPK. Selain itu aspirasi masyarakat yang diterima PAN juga lebih banyak menyebut Pansus Hak Angket KPK tidak obyektif. Misalnya, terkait pihak-pihak yang hendak atau telah dihadirkan oleh pansus angket. PAN mencurigai kehadiran pihak-pihak yang diundang pansus sudah seperti pesan-pesan khusus.

Partai pimpinan Zulkifli Hasan ini enggan terjebak pada kondisi pansus yang tidak objektif. Yandri mengungkap, semangat PAN adalah memperkuat, baik dari dalam maupun dari DPR. Hal itulah yang membuat PAN harus melakukan evaluasi menyeluruh. "Kalau mau memperkuat ayo, yang *nggak* beres ya kita bereskan, tapi jangan ini dijadikan barter atau sesuatu yang mungkin tidak dikehendaki masyarakat," ungkap Anggota Komisi II DPR tersebut.

Sementara itu, Anggota Pansus Hak Angket KPK Fraksi Golkar Mukhamad Misbakhun menegaskan, pansus angket akan tetap berjalan walaupun ditinggalkan oleh siapa pun. "Ditinggalkan oleh siapa pun, itu tetap sebagai pansus," tegas dia.

Misbakhun mengatakan, pansus sudah mendapat pandangan seluruh fraksi saat dibentuk. Bahkan, Pansus Hak Angket KPK dinilai sudah memenuhi syarat untuk alat kelengkapan DPR. Jadi, siapa pun fraksi yang akan menarik diri dari keanggotaan pansus tidak akan berpengaruh pada kinerja pansus untuk membuka dugaan penyimpangan yang dilakukan KPK. "Tidak ada pengaruh," kata dia.

Pansus Hak Angket KPK sudah menggelar rapat evaluasi pada Rabu (26/7) kemarin. Menurut politikus Partai Golkar ini, hasil evaluasi dari seluruh anggota adalah pansus angket sudah berjalan baik. Baik dari kinerja maupun apa yang sudah dijalankan oleh pansus angket.

"(Yang dibahas) mengenai apa saja yang sudah berjalan dan seperti apa, rapat bisa dijalankan seperti apa," jelas dia.

Kalau PAN memutuskan untuk keluar dari pansus angket, langkahnya akan mengikuti fraksi Gerindra yang sudah lebih dulu menyatakan keluar. Gerindra menyatakan keluar setelah menilai kerja Pansus Hak Angket hanya untuk melemahkan KPK. Gerindra justru berharap pemerintah dan DPR dapat memerkuat KPK.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan pemerintah menjanjikan untuk memperkuat KPK dengan menambah jumlah penyidik. Menurut Andre, kondisi saat ini justru terbalik. Gerindra menilai, pemerintah melalui partai koalisi pendukungnya mencoba melemahkan KPK melalui pansus angket. "Sekarang, kita tunggu Pak Jokowi punya keberanian *nggak* menekan partai pendukungnya soal KPK," ucap Andre.

Sejak Gerindra keluar dari pansus, keanggotaan pansus angket memang hanya diisi oleh fraksi partai koalisi pemerintah. Mereka adalah PDIP, Golkar, PPP, Hanura, Nasdem, dan PAN. Hanya PKB fraksi pendukung pemerintah yang menolak pansus angket. Selebihnya, partai di luar pemerintahan, PKS, Demokrat, dan Gerindra menyatakan menolak pembentukan Pansus Hak Angket.

■ singgih wiryono **ed:** agus raharjo